

# Dugaan Korupsi KKP Kementerian Keuangan Dua Tersangka Diajukan ke Pengadilan

Denpasar (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri Gianyar cukup rajin nyetor perkara dugaan korupsi ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Kamis (15/10) kemarin, Kasipidsus Kejari Gianyar Herdian Rahadi kembali nyetor kasus dugaan korupsi Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang dananya bersumber dari Kementerian Keuangan.

Dalam kasus ini, ada dua tersangka yang diajukan ke pengadilan yakni tersangka Made Astika alias Genep dan I Ketut Ludri. "Ketut Ludri adalah sebagai ketua kelompok ternak dan Astika sebagai bendahara,"

sebut Herdian Rahadi saat setelah melimpahkan dakwaan ke pengadilan

Lantas, bagaimana kasus ini hingga masuk ke Pengadilan Tipikor Denpasar? Kasipidsus Kejari Gianyar itu menjelaskan,

untuk mendapatkan subsidi bunga dari Kementerian Keuangan terhadap KKP, Genep dan Ludri merekayasa data, baik nama-nama anggota maupun tanda tangan serta pelunasan. "Di sini ada fiktif, seperti nama-nama anggota dan keduanya merekayasa pelunasan," sebutnya.

Motif yang dilakukan yakni angsuran dari anggota tidak disetorkan melainkan digunakan oleh tersangka sendiri. "Sebetulnya, kredit tahap pertama ini macet. Tetapi atas saran Kepala

Cabang Pembantu BRI Payangan, tersangka supaya pinjam ke LPD. Untuk merekayasa pelunasan, mereka minjam di LPD, seolah-olah terjadi pelunasan dari anggota. Janjinya akan diberikan KKP yang lebih besar lagi," sebut Herdian Rahadi.

Dikatakannya, karena yang pertama pelunasannya direkayasa, terlihat seolah-olah lancar. Otomatis, kredit KKP yang seharusnya diterima anggota kelompok peternakan, jadinya dibayarkan ke LPD. Atas perbuatan tersebut, berdasarkan



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

perhitungan audit BPKP, dari selisih subsidi maka kerugian negara Rp 245 juta. "Karena di luar subsidi, bunga ini merupakan keuangan dari BPD. Makanya, BPD yang mengklaim, mengajukan ke Kementerian Keuangan," kata Herdian Rahadi. (kmb37)

Edisi : Jumat, 16 Oktober 2015

Hal : 2



## Kalah di Sidang Gugatan Istarung Pihak Puri akan Jalani Pemeriksaan

**Gianyar (Bali Post) -**

Setelah kalah di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Gianyar dalam kasus gugatan Istana Presiden RI di Tampaksiring, pihak Puri Tampaksiring yang sebelumnya sebagai penggugat, kini harus bersiap menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dalam tuduhan pemalsuan surat-surat. Seperti disampaikan pihak Sekretariat Negara RI dalam laporannya ke Mapolres Gianyar. Sementara polisi yang menangani secara bertahap mulai memanggil sejumlah saksi.

Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Dewa Putu Gede Anom Danujaya, Kamis (15/10) kemarin, mengatakan hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dalam kasus dengan tuduhan pemalsuan surat-surat tersebut. "Laporannya kan baru kami terima satu minggu lalu, hingga kini kami masih lakukan penyelidikan," katanya.

Dikatakannya, Jumat (16/10) ini, pihaknya berencana mendatangkan pihak Desa Manukaya untuk diperiksa sebagai saksi. Sebab, terbitnya surat tersebut seharusnya sepengetahuan pihak desa. "Pemeriksaan kami

lakukan secara bertahap. Rencana awal, kami akan panggil pihak desa besok (hari ini-red) dalam hal ini Kepala Desa, yang seharusnya mengetahui kebenaran terbitnya surat tersebut," kata Anom Danujaya.

Ia meneruskan, usai memeriksa sejumlah saksi, baru pihaknya bisa mengarahkan pemeriksaan terhadap para terlapor dari pihak Puri Tampaksiring, masing-masing Cokorda Agung Gede P, Sang Putu T, I Gusti Nyoman L, Cokorda Gede PS, Cokorda SP, dan Cokorda RTS. "Sebelum itu masih ada tahapan yang harus kami lakukan, tapi nanti mereka (para terlapor) pasti kami mintai keterangan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya sengketa tanah yang masuk dalam kawasan Istana Presiden RI di Tampaksiring (Istarung) terus memanas. Pascagugatan terhadap Istarung yang diajukan pihak Puri Tampaksiring ke Pengadilan Negeri Gianyar, Sekretariat Negara RI yang diwakili Kepala Istana Tampaksiring melaporkan enam orang dari pihak puri tersebut ke Mapolres Gianyar, dalam tuduhan pemalsuan surat-surat. (kmb35)

Edisi : Jumat, 16 Oktober 2015

Hal : 9



## Organisasi Tak Berbadan Hukum, Masyarakat Kesulitan ✓

Gianyar (Bali Post) -

Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta menegaskan, jika merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, jelas masyarakat Gianyar dan Bali pada umumnya akan kesulitan. Organisasi adat atau kesenian misalnya subak dan sekaa gong



Wayan Tagel Winarta

yang tidak berbadan hukum bakal kesulitan menjalankan kegiatannya. Padahal organisasi-organisasi tersebut menjadi garda depan pelestarian adat dan budaya Bali.

"Solusinya, gubernur dan bupati agar duduk bersama dan mengkonsultasikan masalah ini ke pusat. Kalau perlu ke presiden. Paparkan kalau kondisi Bali beda dengan daerah lain agar Bali dipermudah pencairan hibahnya sebagai pendukung pelestarian adat dan budaya. Ini harus segera disikapi sebab kalau tidak, bukan cuma di perubahkan tapi juga di APBD Induk bakal jadi ganjalan," tegasnya.

Di sisi lain, Tagel juga menyebut enggannya anggota dewan mengikuti rapat Banggar kemarin, lantaran mereka menginginkan kehadiran bupati. Meski secara etika bupati tidak harus mengikuti rapat tersebut, sebagian besar anggota dewan memandang kehadiran bupati sangat penting guna menyikapi sejumlah persoalan di Gianyar termasuk masalah bansos dan hibah tersebut. "Rapatnya ditunda jadi hari Senin depan. Saya pikir rapat tidak akan dibatalkan lagi asalkan bupati hadir," katanya. (kmb35)

Edisi : Jember, 16 Oktober 2015

Hal : 9



# Pencairan Hibah dan Bansos Ngambang Belasan Anggota Dewan

## Enggan Hadir,

## Rapat Banggar Batal

Gianyar (Bali Post) -

Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gianyar, Kamis (15/10) kemarin, batal terlaksana. Sebagian besar anggota Banggar menolak hadir pada rapat beragendakan pembahasan perdana KUA-PPAS tahun 2016 lantaran belum adanya kejelasan nasib pencairan dana bansos dan hibah di APBD Perubahan 2015. Tidak hanya itu, anggota dewan juga kecewa bupati tidak hadir dalam rapat.

"Tidak jadi rapatnya. Pembahasan banggar tidak kuorum. Dewan tidak mau menghadiri rapat karena dari eksekutif hanya dipimpin Asisten III. Selain itu dari SKPD banyak tidak dihadiri pimpinannya. Kebanyakan hanya diwakilkan. Masalah lainnya juga menyangkut dana bansos dan hibah," ujar anggota Komisi III DPRD Gianyar, Luh Suciningsih.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta membenarkan adanya pembatalan rapat kemarin. Menurutnya, dari 20 anggota Banggar, memang ada 11 orang anggota yang menandatangani daftar hadir. Akan tetapi hanya 4 orang yang hadir secara fisik.

Tagel mengatakan, anggota dewan banyak yang enggan ikut rapat. Alasan utamanya karena sampai sekarang tidak ada kepastian pencairan dana hibah dan bansos yang dianggarkan di APBD-P 2015. "Kami di lembaga sudah menganggarkan hibah sekitar Rp 9 miliar dan bansos

sekitar Rp 5 miliar. Tapi sampai saat ini tidak ada kepastian apakah dana itu bisa dicairkan atau tidak. Sementara masyarakat sudah bolak-balik melakukan perbaikan proposal. Sudah berapa kali mereka melakukan revisi tapi pencairannya masih ngambang. Karena masalah ini, mereka (anggota dewan - red) masih enggan membahas APBD Induk 2016," katanya.

Menurut Tagel, dari penjelasan eksekutif, pencairan dana bansos sebenarnya tidak menjadi persoalan. Yang rumit justru pencairan dana hibah pascadiberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya mengenai persyaratan penerima dana yang harus berbadan hukum. Pencairan dana hibah di Gianyar masih jadi tanda tanya mengingat di tingkat provinsi, pergub belum ditandatangani gubernur. "Kabupaten jelas menunggu kepastian bisa tidaknya dana hibah dicairkan. Kalau di provinsi tidak bisa, ya di kabupaten susah," jelasnya. (kmb25)

Edisi : Jumat, 16 Oktober 2015

Hal : 9



# Tersangka Baru

## Kejari Bidik

### Janapria Kembali Diperiksa

Semarapura (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung diam-diam terus melakukan pengembangan terhadap dugaan kasus korupsi pengadaan lahan dermaga daratan di eks Galian C. Meskipun mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra dan tim sembilan telah divonis hakim, pihak kejaksaan tetap membidik tersangka baru. Hal ini dibuktikan dengan diperiksanya kembali mantan Sekda Klungkung Ketut Janapria, Kamis (15/10) kemarin.

Janapria yang telah divonis dua tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan kasus pengadaan lahan dermaga. Pihak kejaksaan juga melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya, yakni Putu Anika dan Wayan Pegig Suwatama. Kedua saksi ini merupakan saksi baru.

Putu Anika diperiksa karena sebelumnya bertugas sebagai bendahara pengeluaran di Dinas Perhubungan dan Infokom Klungkung. Sementara Wayan Pegig diperiksa sebagai perwakilan sekaligus pemilik lahan. Ketiganya diperiksa dalam satu ruangan oleh Kasi Pidsus Kejari Klungkung Made Pasek. Janapria yang menggunakan baju batik warna merah mulai diperiksa oleh pihak kejaksaan sekitar pukul 10.00 wita. Pemer-

iksaan Janapria selaku ketua panitia pengadaan lahan ini dilakukan hingga sore. Sementara dua saksi lainnya (Pegig dan Anika) diperiksa lebih dulu.

Pihak Kejaksaan belum mau membeberkan hasil pemeriksaan Janapria dan dua saksi lainnya. Kasi Pidsus Made Pasek hanya mengatakan bahwa pemeriksaan Janapria bersama dua saksi lainnya terkait pengembangan kasus korupsi pengadaan lahan dermaga. "Namanya pengembangan, selalu ada kemungkinan calon tersangka. Soal apakah ada tersangka baru nanti, kami akan sampaikan," ujar Pasek.

Pemeriksaan Janapria dan dua saksi lainnya ini lebih mengarah terhadap pembayaran dan bagaimana prosedur pengadaan lahannya. Dia berdalih baru sekarang melakukan pengembangan karena sebelum-

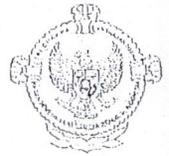
nya lebih fokus terhadap kasus mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra dan tim sembilan. Di samping itu, pemeriksaan ketiga saksi tersebut murni dilakukan pihak kejaksaan karena telah memiliki alat bukti. "Pemeriksaan ini saling berkaitan. Indikasi penyimpanan juga sama dengan pemeriksaan sebelumnya, cuma ada pengembangan," terangnya.

Menurut Pasek, masih ada upaya pemanggilan saksi lagi terhadap kasus pengembangan pengadaan lahan dermaga. Saksi yang akan dipanggil tergantung dari hasil pemeriksaan ketiga saksi. Apalagi ketiga saksi sangat kooperatif memberikan keterangan.

Ketiga saksi masing-masing diberikan 20 pertanyaan. Dua saksi diakui Pasek masih memberikan keterangan yang sama, sedangkan Janapria masih

Edisi : Jumat, 16 Oktober 2015

Hal : 10



Sambungan - - -



Bali Post/kmb

**Ketut Janapria (kiri)**

menjalani proses pemeriksaan. "Kami akan kaji dulu keterangan ketiga saksi. Percuma kalau menghadirkan saksi banyak kalau keterangannya sama," katanya. Terkait dengan nasib tiga tersangka lainnya, yakni I.B. Susila, Gusti Ayu Wardani, dan Luh Hendrawati yang belum divonis hakim, Pasek menjelaskan, berkas ketiga tersangka telah diproses, bahkan siap dilimpahkan ke pengadilan.

Ketiga tersangka terlibat dalam kasus dugaan korupsi lahan dermaga dan berperan sebagai makelar tanah.

Sebenarnya ada lima makelar tanah yang ditetapkan jaksa sebagai Tersangka, namun Anggara Junisari dan Dewa Ayu Budi Arini, kasusnya telah di-SP3-kan bersama tersangka lainnya bernama Wayan Mergeg yang dinilai menjual tanah negara. (kmb)

2

Edisi : Jumat, 16 Oktober 2015

Hal : 10